

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya air serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Pergub 45, 2014). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap

entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap
- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- f. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- g. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 54 Tahun 2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah Dearah;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- t. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 921/00117982 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- I. Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran
- II. Neraca Komparatif SKPD
- III. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1.1. Ekonomi Makro
- 1.2. Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Belanja

Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7. Penutup

Lampiran Tambahan

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro dibidang pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah tergambar dalam luas area layanan irigasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 953.824 Ha yang tercakup dalam 11.542 Daerah Irigasi (DI). Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Kewenangan	Luar Area (Ha)	%	Jumlah Daerah Irigasi (DI)
1	Pusat	347.674	34,96	33
2	Provinsi	86.865	8,69	108
3	Kabupaten/Kota	519.285	56,35	11.401
	Jumlah	953.824	100	11.542

Sedangkan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), di Provinsi Jawa Tengah terdapat 202 DAS yang dikelompokkan dalam 10 Wilayah Sungai (WS) terdiri dari : 6 WS kewenangan Pusat yaitu Cimanuk Cisanggarung, Bengawan Solo, Progo Opak Oyo, Citanduy, Jratunseluna dan Serayu Bogowonto; 2 WS kewenangan Provinsi Jawa Tengah yaitu Pemali Comal dan Bodri Kuto; dan 2 WS kewenangan Kabupaten Jepara yaitu Wiso Gelis dan Kepulauan Karimunjawa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

2.1.1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pemenuhan kebutuhan air baku sampai sampai akhir tahun 2016 terlihat dari indikator capaian kinerja program berupa persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai sebesar 79,00% melebihi dari target 78,00% atau 101,28%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 76,00%.

2.1.2. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Capaian program pengendalian banjir dan pengamanan panatai dapat dilihat dari capaian indikator kinerja program berupa prosentase pemenuhan kebutuhan air baku mencapai sebesar 56,49% melebihi dari target 56,00% atau 100,88%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 54,49%.

2.1.3. Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya capaian indikator kinerja program berupa persentase sungai dalam kondisi baik mencapai sebesar 51,96% sesuai target 51,96% atau 100%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 51,86%.

2.1.4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai memiliki 2 indikator kinerja program, yaitu menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir mencapai sebesar 3% seluas 5.000 Ha sesuai target sebesar 3,00% seluas 5.000 Ha dan menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,20% seluas 5.188 Ha atau semula luasan daerah genangan akibat banjir pada tahun 2015 lalu sebesar 156.812 Ha menurun menjadi sebesar 151.812 Ha atau 100,12% melebihi terhadap target tahun 2016 yaitu 152.000 Ha; dan Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah Pantura mencapai sebesar 100% sesuai target dan sama dari capaian tahun sebelumnya.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, dan untuk menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, maka Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pencapaian target kegiatan di Dinas Pengelolaan Sumber Day Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 tercapai 100%, serta tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 45 tahun 2014, bahwa SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi menggunakan basis akuntansi basis akrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setaio saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

4.3.2. Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.3.3. Persediaan

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 921/00017982 tanggal 25 Oktober 2016 bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2016.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya

penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

4.3.10. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.3.13. Ekuitas

Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 45 tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bab 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.820.879.155,00 atau 89,48% dari target Rp4.270.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.022.687.284,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	Rp 4.270.000.000	Rp 3.820.879.155	89,48%	Rp 3.022.687.284
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4.270.000.000	Rp 3.820.879.155	89,48%	Rp 3.022.687.284

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.820.879.155,00 atau 89,48% dari target Rp4.270.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.022.687.284,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 4.270.000.000	Rp 3.820.579.155	89,47%	Rp 3.022.687.284
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	Rp 300.000		-
Jumlah	Rp 4.270.000.000	Rp 3.820.879.155	89,47%	Rp 3.022.687.284

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.820.579.155,00 atau 89,47% dari target Rp4.270.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.022.687.284,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	Rp 4.270.000.000	Rp 3.820.579.155	89,47%	3.022.687.284
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4.270.000.000	Rp 3.820.579.155	89,47%	Rp 3.022.687.284

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.820.579.155,00 atau 89,47% dari target Rp4.270.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.022.687.284,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 4.270.000.000	Rp 3.820.579.155	89,47%	3.022.687.284
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4.270.000.000	Rp 3.820.579.155	89,47%	Rp 3.022.687.284

5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp300.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	Rp -	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	300.000	-	-
Jumlah	-	Rp 300.000	-	-

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp146.395.091.034,00 atau 96,88% dari anggaran Rp151.115.110.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp157.602.059.528,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 94.009.100.000	Rp 91.317.278.528	97,14%	Rp 84.871.766.776
Belanja Barang & Jasa	Rp 57.106.010.000	Rp 55.070.915.876	96,44%	Rp 72.730.292.752
Jumlah	Rp 151.115.110.000	Rp 146.388.194.404	96,87%	Rp 157.602.059.528

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 91.317.278.528,00 atau 97,14% dari anggaran Rp 94.009.100.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar 84.871.766.766,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 80.246.191.000	Rp 78.333.148.528	97,62%	Rp 78.848.420.276
Belanja Pegawai langsung	Rp 13.762.909.000	Rp 12.984.130.000	94,34%	Rp 6.023.346.500
Jumlah	Rp 94.009.100.000	Rp 91.317.278.528	97,14%	Rp 84.871.766.776

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 55.070.915.876,00 atau 96,43% dari anggaran Rp 57.106.010.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp72.730.292.752,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Habis Pakai	Rp 3.023.349.000	Rp 2.982.171.067	98,64%	Rp 3.691.283.108
Belanja Bahan/Material	Rp 3.991.531.000	Rp 3.964.164.390	99,31%	Rp 5.854.457.370
Belanja Jasa Kantor	Rp 2.494.625.000	Rp 2.207.443.425	88,49%	Rp 2.102.027.193
Belanja Premi Asuransi	Rp 62.988.000	Rp 59.737.000	94,84%	Rp 82.632.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 3.026.050.000	Rp 2.975.689.901	98,34%	Rp 2.917.063.641
Belanja Cetak dan Pengadaan	Rp 1.127.060.000	Rp 1.103.061.989	97,87%	Rp 1.244.190.128
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp 259.200.000	Rp 239.810.000	92,52%	Rp 277.240.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 155.075.000	Rp 131.567.500	84,84%	Rp 125.670.000
Belanja Sewa Alat Berat	Rp 223.050.000	Rp 221.673.500	99,38%	Rp 263.607.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 172.010.000	Rp 171.860.000	99,91%	Rp 130.190.000
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 1.251.395.000	Rp 1.158.199.500	92,55%	Rp 1.191.656.750
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 139.500.000	Rp 137.175.000	98,33%	Rp 373.050.000
Belanja Pakaian Kerja	Rp 21.824.000	Rp 21.750.000	99,66%	Rp 20.625.000
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu		-		
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 8.056.204.000	Rp 7.742.627.508	96,11%	Rp 7.797.650.064
Belanja Beasiswa Pendidikan				
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Rp 24.750.000	Rp 18.300.000	73,94%	Rp 19.000.000
Belanja Pemeliharaan	Rp 30.302.549.000	Rp 29.440.207.550	97,15%	Rp 37.957.838.334
Belanja Jasa Konsultasi	Rp 2.571.800.000	Rp 2.309.202.546	89,79%	Rp 8.515.832.164
Belanja Barang & Jasa BLUD				
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp 17.550.000	Rp 16.775.000	95,58%	Rp 13.530.000
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp 188.500.000	Rp 169.500.000	89,92%	Rp 152.750.000
Jumlah	Rp 57.109.010.000	Rp 55.070.915.876	96,43%	Rp 72.730.292.752

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp150.432.667.778,00 atau 83,62% dari anggaran Rp179.894.694.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp86.958.139.367,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 6.818.091.000	Rp 6.355.068.409	93,21%	Rp 7.897.018.228
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 2.399.985.000	Rp 2.151.414.000	89,64%	Rp 291.464.000
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	Rp 170.676.618.000	Rp 141.926.185.369	83,16%	Rp 78.769.657.139
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	Rp 179.894.694.000	Rp 150.432.667.778	83,62%	Rp 86.958.139.367

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp6.355.068.409,00 atau 93,21% dari anggaran Rp6.818.091.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp7.897.018.228,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	Rp2.002.929.000	Rp1.999.179.000	99,81%	Rp 5.218.582.500
Belanja Alat-alat Angkut	Rp 560.000.000	Rp 486.765.000	86,92%	Rp 745.757.364
Belanja Alat-alat Bengkel	Rp1.375.802.000	Rp1.239.823.000	90,12%	Rp 896.665.455
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp2.324.820.000	Rp2.144.330.409	92,24%	Rp 888.212.909
Belanja Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 554.540.000	Rp 484.971.000	87,45%	Rp 147.800.000
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	Rp6.818.091.000	Rp6.355.068.409	93,21%	Rp 7.897.018.228

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.151.414.000,00 atau 89,64% dari anggaran Rp2.399.985.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 291.464.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	2.399.985.000	2.151.414.000	89,64%	Rp 291.464.000
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	2.399.985.000	2.151.414.000	89,64%	Rp 291.464.000

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp141.926.185.369,00 atau 83,16% dari anggaran Rp170.676.618.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp78.769.657.139,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	Rp 170.654.828.000	Rp 141.905.314.469	83,15%	Rp 78.689.082.139
Belanja Instalansi dan Jaringan	Rp 21.790.000	Rp 20.870.900	95,78%	Rp 80.575.000
Jumlah	Rp 170.676.618.000	Rp 141.926.185.369	83,16%	Rp 78.769.657.139

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar minus Rp292.999.983.027,00, sedangkan Tahun 2015 minus sebesar Rp241.537.511.647,00

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.709.810.067.841,15 naik sebesar Rp121.570.109.647,03 atau 2,18% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.588.239.958.194,12.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp665.685.443,33 turun sebesar Rp334.122.466,67 atau 33,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 999.807.910,00.

5.2.1.1.1. Setara Kas

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2015 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2015 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2016 sebesar Rp 49.780.833,33 turun sebesar Rp 17.804.166,67 atau 26,34% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 67.585.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Asuransi BMD	49.780.833,33	67.585.000,00
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	49.780.833,33	67.585.000,00

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 615.904.610,00 naik/turun sebesar Rp 316.318.300,00 atau 33,93% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 932.222.910,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Persediaan Bahan Pakai Habis	48.440.860	56.594.500
Persediaan Bahan/Material	519.896.850	812.858.010
Persediaan Cetak	72.500	6.969.000
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	47.494.400	55.801.400
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
Jumlah	615.904.610	932.222.910

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.709.144.382.397,85 naik sebesar Rp121.904.232.113,73 atau 2,18% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.587.240.150.284,12 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	5.587.240.150.284,12
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	150.432.667.778,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	1.548.297.472,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	151.980.965.250,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	21.750.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	1.548.297.472,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	593.085.646,00
Jumlah	Rp	2.163.133.118,00
Grand Total	Rp	5.709.144.382.397,85

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal selama Tahun 2016 sebesar 150.432.667.778,00.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset terdiri dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Air Irigasi sebesar Rp52.750.000,00 dan belanja modal yang menjadi Bangunan Air Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.495.583.022,00.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap atas belanja modal selama tahun 2016 sebesar Rp21.750.000,00.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap terdiri dari Bangunan Air Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp52.750.000,00 dan belanja modal yang menjadi Bangunan Air Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.495.583.022,00.

- ✓ Koreksi, adanya belanja modal modal tahun anggaran 2016 yang tidak memenuhi kategori sebagai aset, yaitu belanja inventarisasi aset Bangunan Air Irigasi sebesar Rp593.085.646,00.

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.242.935.562.161,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.242.935.562.161,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Tanah	5.242.935.562.161,00	-	-	5.242.935.562.161,00
Jumlah	5.242.935.562.161,00	-	-	5.242.935.562.161,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	5.242.935.562.161,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	
Grand Total	Rp	5.242.935.562.161,00

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 41.163.474.791,00 naik/turun sebesar Rp 6.333.318.409,00 atau 18,18% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 34.830.156.382,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Berat	20.318.260.500	1.999.179.000	-	18.319.081.500
Alat Angkut	4.631.537.757	486.765.000	-	4.144.772.757
Alat Bengkel dan Ukur	1.479.002.000	1.218.073.000	-	260.929.000
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.770.829.229	2.144.330.409	-	8.626.498.820
Alat Studio dan Komunikasi	2.124.603.200	484.971.000	-	1.639.632.200
Alat Kedokteran	-	-	-	-

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Laboratorium	1.831.751.355	-	-	1.831.751.355
Alat Keamanan	7.490.750	-	-	7.490.750
Jumlah	41.163.474.791	6.333.318.409	-	34.830.156.382

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	34.830.156.382,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	6.355.068.409,00
Belanja Barang/Jasa	Rp-	
Hibah	Rp-	
Mutasi Masuk	Rp-	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp-	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp-	
Koreksi	Rp-	
Jumlah	Rp	6.355.068.409,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	21.750.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp-	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp-	
Mutasi Keluar	Rp-	
Koreksi	Rp-	
Jumlah	Rp	21.750.000,00
Grand Total	Rp	41.163.474.791,00

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.791.472.375,00 naik sebesar Rp2.151.414.000,00 atau 14,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp14.640.058.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Gedung	15.782.333.000	2.151.414.000		13.630.919.000
Monumen	1.009.139.375			1.009.139.375
Jumlah	16.791.472.375	2.151.414.000		14.640.058.375

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	14.640.058.375,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	2.151.414.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	2.151.414.000,00

Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	
Grand Total	Rp	16.791.472.375,00

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp544.458.376.291,00 naik/turun sebesar Rp139.890.231.151,00 atau 34,58% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp404.568.145.165,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	544.043.924.724,00	139.869.360.226,00	-	404.174.564.498,00
Instalasi	414.451.567,00	20.870.900,00	-	393.580.667,00
Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	544.458.376.291,00	139.890.231.151,00	-	404.568.145.165,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	404.568.145.165,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	139.890.231.151,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	139.890.231.151,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	
Grand Total	Rp	544.458.376.291,00

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp87.972.866,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp87.972.866,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Buku Perpustakaan	87.972.866,00	-	-	87.972.866,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	-
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	87.972.866,00	-	-	87.972.866,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	87.972.866,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	
Grand Total	Rp	87.972.866,00

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.495.583.022,00 naik/turun sebesar Rp1.442.868.572,00 atau 27,37% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp52.714.540,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.495.583.022,00	1.442.868.572,00	52.714.450,00	52.714.450,00
Jumlah	1.495.583.022,00	1.442.868.572,00	52.714.450,00	52.714.450,00

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi	Fisik (%)
1	Inventarisasai Prasarana Alokasi Air	BPSDA TARU Pemali Comal	610/3876	96.991.000	96.991.000	100%
2	Inventarisasai Pengelolaan Aset Prasarana Sungai	BPSDA TARU Jratun	614/1884	471.347.000	471.347.000	100%

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp137.788.059.133,15 naik/turun sebesar Rp27.913.600.018,27 atau 25,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp109.874.459.114,88 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Alat Besar	13.025.002.525,00	12.102.113.000,00
Alat Angkut	2.853.736.884,65	2.463.935.679,40
Alat Bengkel	412.024.799,60	160.336.599,80
Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.173.237.268,70	7.033.974.688,15
Alat Studio dan Komunikasi	1.597.319.100,00	1.385.900.160,00
Alat Laboratorium	808.642.891,00	625.015.095,50
Alat Keamanan	7.490.750,00	7.490.750,00
Gedung	7.651.228.095,68	7.313.239.726,09
Monumen	173.063.245,00	152.880.457,50
Bangunan Air dan Irigasi	102.997.574.588,17	78.552.135.142,56
Instalasi	88.738.985,35	77.437.815,88
Jumlah	137.788.059.133,15	109.874.459.114,88

5.2.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.381.451.317,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.381.451.317,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Barang Rusak Berat	1.381.451.317,00	1.381.451.317,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.381.451.317,00)	(1.381.451.317,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto		
Jumlah Aset Lainnya	-	-

5.2.1.4.1. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.381.451.317,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.381.451.317,00 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Alat Besar	169.620.000	169.620.000
Alat Angkut	443.640.000	443.640.000
Alat Bengkel	51.850.000	51.850.000
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	551.919.317	551.919.317
Alat Studio dan Komunikasi	162.672.000	162.672.000
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Gedung	-	-
Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-

Keterangan	2016	2015
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Buku Perpustakaan	-	-
Barang Bercork Kebudayaan	-	-
Hewan dan Tumbuhan	-	-
Jumlah	1.381.451.317	1.381.451.317

5.2.1.4.2. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 minus sebesar Rp1.381.451.317,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 minus sebesar Rp1.381.451.317,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Alat Besar	169.620.000	169.620.000
Alat Angkut	443.640.000	443.640.000
Alat Bengkel	51.850.000	51.850.000
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	551.919.317	551.919.317
Alat Studio dan Komunikasi	162.672.000	162.672.000
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Jumlah	1.381.451.317	1.381.451.317

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.709.810.067.841,15 naik sebesar Rp121.570.109.647,03 atau 1,31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.588.239.958.194,12.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016. Pendapatan-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.820.879.155,00 naik sebesar Rp798.191.907,00 atau 26,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.022.687.248,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Pendapatan Asli daerah	3.820.879.155,00	3.022.687.248,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-
Jumlah	3.820.879.155,00	3.022.687.248,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.820.879.155,00 naik sebesar Rp798.191.907,00 atau 26,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.022.687.248,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	3.820.579.155,00	3.022.687.248,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	300.000,00	-
Jumlah	3.820.879.155,00	3.022.687.248,00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.820.579.155 naik sebesar Rp 797.891.907,00 atau 26,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.022.687.248,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Retribusi Jasa Umum	-	-
Retribusi Jasa Usaha	3.820.579.155,00	3.022.687.248,00
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
Jumlah	3.820.579.155,00	3.022.687.248,00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp 300.000,00 naik/turun 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	2015
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	300.000,00	-
Pendapatan Bunga	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	-
Jumlah	300.000,00	-

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2016 sebesar Rp174.635.916.888,94 turun sebesar Rp6.174.343.322,03 atau 3,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp180.810.260.210,97.

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp174.635.916.888,94 turun sebesar Rp6.174.343.322,03 atau 3,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp180.810.260.210,97.

Keterangan	2016	2015
Beban Pegawai	91.317.278.528,00	84.872.280.636,00
Beban Barang & Jasa	55.405.038.342,67	72.697.456.696,67
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.913.600.018,27	23.240.522.878,30
Beban Lainnya	-	-
Jumlah	174.635.916.888,94	180.810.260.210,97

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp91.317.278.528,00 naik sebesar Rp6.896.630,00 atau 0,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp91.317.278.528,00.

Keterangan	2016	2015
Beban Pegawai Tidak langsung	78.340.045.158,00	78.333.148.528
Beban Pegawai Langsung	12.984.130.000,00	12.984.130.000
Jumlah	91.324.175.158,00	91.317.278.528,00

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp55.405.038.342,67 turun sebesar Rp17.292.418.354,00 atau 23,79% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp72.697.456.696,67.

Keterangan	2016	2015
Beban Persediaan	9.699.615.246,00	12.363.157.134,00
Beban Jasa	4.516.645.971,00	8.078.501.659,67
Beban Premi Asuransi	77.541.166,67	84.887.864,00
Beban Sewa	764.911.000,00	3.313.078.000,00
Beban Pemeliharaan	32.415.897.451,00	40.874.901.975,00
Beban Perjalanan Dinas	7.742.627.508,00	7.797.650.064,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	187.800.000,00	185.280.000,00
Jumlah	55.405.038.342,67	72.697.456.696,67

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.913.600.018,27 naik sebesar Rp4.673.077.139,97 atau 20,11% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2015 sebesar Rp23.240.522.878,30.

Keterangan	2016	2015
Beban Penyusutan Aset Tetap	27.913.600.018,27	23.240.522.878,30
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	27.913.600.018,27	23.240.522.878,30

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA
1	Ekuitas Awal	Rp 5.588.239.958.194,12
2	Surplus/Defisit - LO	Rp (170.815.037.733,94)
3	RK PPKD	Rp 292.999.983.027,00
4	Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp (614.835.646,03)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	Rp -
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Lainnya	Rp -
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	Rp -
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	Rp -
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	Rp -
4.6	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap:	Rp (614.835.646,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp 1.548.297.472,00
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset	Rp (21.750.000,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp (593.085.646,00)
4.7	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan:	Rp (0,03)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	Rp (0,03)
4	Ekuitas Akhir	Rp 5.709.810.067.841,15

Bab 6 Penjelasan Informasi Non Keuangan

6.1. Gambaran Umum

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu organisasi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai strategi dan kebijakan untuk meraih keberhasilan dan tekat menunjang program nasional utamanya dalam sektor pangan. Konsep satu sungai satu rencana dan satu pengelolaan secara terpadu merupakan pegangan yang senantiasa dikembangkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan permasalahan pengelolaan sumber daya air seperti banjir dengan daya rusak air, kekeringan, kualitas air dengan pencemaran lingkungan serta kebutuhan pasokan air baku untuk minum, irigasi, perikanan, listrik dan pariwisata, dapat direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir.

Pencanangan Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001 dan dengan terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air diluar kewenangan provinsi sehingga banyak fasilitas Sumber Daya Air yang kurang mendapat perhatian oleh kabupaten/kota termasuk pelaksanaan Operasi Pemeliharaan yang tidak terintegrasi dapat berakibat fungsi jaringan menjadi kurang optimal. Selanjutnya dengan ketentuan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan merumuskan Perencanaan Stratejik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasar Peraturan Daerah No 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok *melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan*. Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sumber daya air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan pantai, dan kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

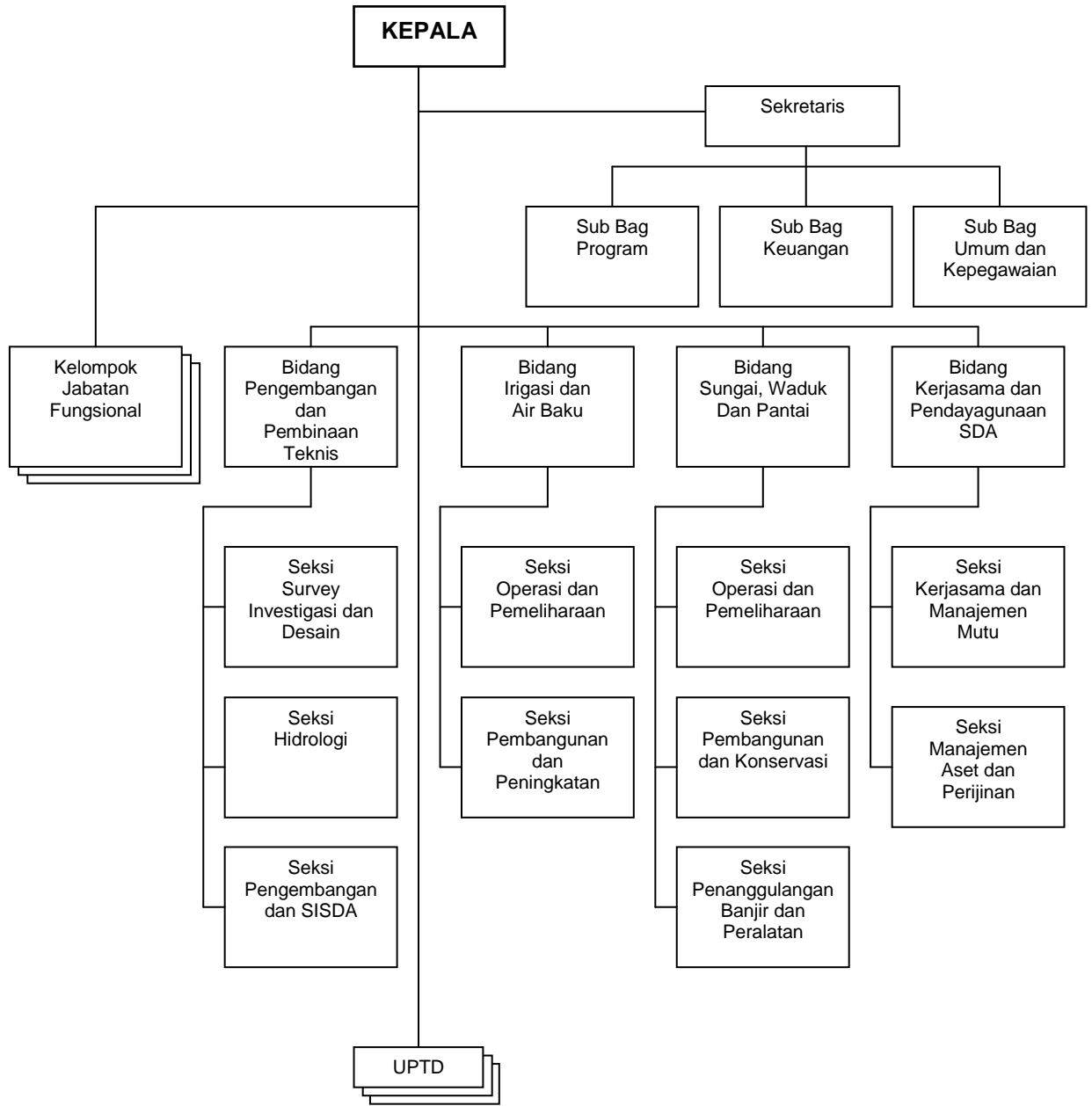
6.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi Dinas PSDA

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Survey, Investigasi dan Desain
 2. Seksi Hidrologi
 3. Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi SDA
- d. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri dari 2 seksi:
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan
- e. Bidang Sungai, Waduk dan Pantai, terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 2. Seksi Pembangunan dan Konservasi
 3. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan
- f. Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari 2 seksi:
 1. Seksi Kerjasama dan Manajemen Mutu
 2. Seksi Manajemen Aset dan Perijinan
- g. UPTD, terdiri dari:
 1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
 3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
 5. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
 6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH



6.4. Visi dan Misi

6.4.1. Visi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan eksistensi organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa depan, telah menetapkan visi: **"Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang handal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat"**.

6.4.2. Misi

- 1). Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap upaya konservasi Sumber Daya Air secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2). Mewujudkan pengembangan Sumber Daya Air secara terpadu berkelanjutan dan kelestarian fungsi prasarana dan sarana SDA.
- 3). Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber-sumber produksi pertanian.
- 4). Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan lingkungan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.
- 5). Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air yang memberikan keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.

6.5. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional khususnya pengelolaan Irigasi/Rawa, Sungai sebagai berikut :

6.5.1. Pengelolaan Irigasi/Rawa

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 160 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Tengah.

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 611/23/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.
- Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.

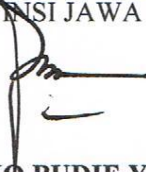
6.5.2. Pengelolaan Sungai

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- Permen PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan Jo. Kepmen Kimpraswil Nomor 296 /KPTS /2001 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah.

Bab 7 Penutup

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO BUDIE YUWONO, ME

Pembina Utama Madya

NIP.19580905 198302 1 001